

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Partai Masyumi¹ dan Partai Nahdlatul Ulama² merupakan dua partai Islam terbesar di Republik Indonesia pada kurun waktu 1945-1960-an. Masyumi pada awalnya adalah partai politik Islam tunggal di Indonesia berdasarkan resolusi Mukhtar Umat Islam Indonesia yang dilaksanakan di Yogyakarta pada 7-8 November 1945.³ Keputusan untuk menjadikan Masyumi sebagai partai Islam tunggal merupakan hasil kesepakatan perwakilan umat Islam yang di antaranya adalah pemuka-pemuka organisasi sosial keagamaan. NU menjadi salah satu organisasi sosial keagamaan yang turut merintis pembentukan dan menjadi anggota istimewa Masyumi. Partisipasi NU dalam Masyumi dikukuhkan dalam pelaksanaan Mukhtar NU di Purwokerto pada 1946.⁴ Para pemuka NU menganjurkan agar warga NU di berbagai daerah berbondong-bondong memasuki Masyumi dalam pelaksanaan mukhtar tersebut.

Masyumi yang akan dibahas dalam skripsi ini bukan Masyumi bentukan Pemerintahan Militer Jepang. Masyumi yang didirikan pada 7 November 1945 tidak lagi menggunakan kepanjangan, “Majelis Syuro Muslimin Indonesia”

¹ Pada bagian selanjutnya, istilah Partai Masyumi akan disebut Masyumi.

² Pada bagian selanjutnya, istilah NU sebagai organisasi sosial keagamaan maupun partai politik akan disebut NU.

³ *Kedaulatan Rakjat*, 9 November 1945; Remy Madinier, *Partai Masjumi Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. Bandung: Mizan, 2013, hlm. 66; Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1987, hlm. 47.

⁴ Lihat dalam tulisan K.H. M. Dahlan, *Riwajat Singkat Nahdlatul Ulama*. Majalah *Gema Muslimin*, No. 2, 1954, hlm. 37.

seperti pada era Pendudukan Jepang. Rencana pemilihan nama “Masyumi” untuk nama partai Islam sempat ditentang oleh sebagian peserta muktamar. Mereka tidak setuju karena istilah tersebut identik dengan pengaruh Jepang. Mereka menghendaki agar partai Islam itu diberi nama “Partai Rakyat Islam”⁵ akan tetapi mayoritas peserta muktamar lebih memilih “Masyumi” sebagai nama partai Islam yang akan mereka dirikan. Alasan utama penggunaan nama “Masyumi” adalah agar partai Islam tersebut lebih mudah dikenali masyarakat, berhubung istilah “Masyumi” telah populer di kalangan masyarakat Indonesia.⁶

Masyumi menjadi partai Islam yang besar karena didukung oleh dua jenis keanggotaan. Partai tersebut memiliki jenis keanggotaan perseorangan dan keanggotaan istimewa. Jenis keanggotaan istimewa Masyumi ditujukan untuk mewadahi berbagai organisasi sosial keagamaan Islam yang tidak bergerak di bidang politik.⁷ Keanggotaan istimewa diharapkan dapat menjadi saluran aspirasi organisasi sosial keagamaan dalam bidang politik, dengan demikian, Masyumi dapat menjadi badan satu-satunya yang merepresentasikan suara umat Islam dalam politik Indonesia.

Masyumi hanya mampu menjadi partai Islam tunggal di Indonesia selama kurun waktu dua tahun. Sebagian aktivis partai Islam itu merasa tidak memperoleh jaminan pembagian kekuasaan yang memuaskan. Masyumi

⁵ Usulan ini didukung oleh Haji Agus Salim dan Mohamad Roem. Selengkapnya lihat dalam Soemarso Soemarsono, *Mohamad Roem 70 Tahun*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1978, hlm. 63.

⁶ Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*. Yogyakarta: LKis, 2013, hlm. 329.

⁷ Dalam Anggaran Dasar Partai Masyumi 1952 pasal V tentang Anggota dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan anggota istimewa adalah, “ialah pengurus besar/pusat perhimpunan Islam yang bukan partai politik”. Lihat dalam Yayasan Pembangunan Umat, *Fakta Dokumenta 2*. Jakarta: Yayasan Pembangunan Umat, 1984, hlm. 30.

ditinggalkan separuh anggota bekas aktivis Partai Syarikat Islam Indonesia⁸ setelah mereka memutuskan untuk menerima tawaran jabatan dalam Kabinet Amir Sjarifuddin.⁹ Bekas aktivis PSII tersebut mendeklarasikan kembali pembentukan PSII pada 1947.

PSII tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat setelah kemerdekaan Indonesia. Pengaruh organisasi tersebut semakin melemah setelah Tjokroaminoto meninggal dunia pada 1934. PSII lebih sering diwarnai konflik kepentingan sejak Tjokroaminoto wafat. Konflik di internal PSII menyebabkan Haji Agus Salim, sebagai pimpinan yang pernah ikut membesarkan organisasi tersebut keluar.¹⁰ Kalangan PSII dituduh oportunistis dan menciderai perjuangan Islam setelah menerima jabatan dalam Kabinet Amir Sjarifuddin,¹¹ meski begitu, keluarnya sebagian bekas aktivis PSII dari Masyumi tidak terlalu menggoncangkan internal partai tersebut.

Masyumi mulai mengalami kegoncangan internal setelah muncul wacana NU hendak keluar dari partai tersebut. Wacana tersebut cukup menarik perhatian media massa saat itu.¹² NU resmi keluar dari Masyumi setelah pelaksanaan Mukhtar NU ke-XIX di Palembang pada 5-6 April 1952. Keluarnya organisasi sosial keagamaan itu cukup disayangkan oleh sejumlah tokoh Masyumi. NU sendiri memiliki pertimbangan dan alasan yang dapat dipahami untuk keluar dari

⁸ Pada bagian berikutnya Partai Syarikat Islam Indonesia akan disebut PSII.

⁹ Wondoamiseno menjadi Menteri Dalam Negeri, Arudji Kartawinata menjadi Menteri Muda Pertahanan, Sjahbuddin Latif menjadi Menteri Penerangan, dan Sukoso Wirjosaputro menjadi Menteri Penerangan dan Menteri Muda Sosial. Lihat dalam Deliar Noer, *op cit*, hlm. 170.

¹⁰ Suradi, *Haji Agus Salim dan Konflik Politik dalam Sarekat Islam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 60; Deliar Noer, *ibid*, hlm. 77.

¹¹ Deliar Noer, *loc cit*, hlm. 170.

¹² Salah satu media massa nasional yang cukup intens meliput ketegangan NU dengan Masyumi adalah harian *Berita Indonesia*.

Masyumi. Elite NU mengklaim tidak menghendaki dualisme keanggotaan partai Islam itu. Kegagalan NU untuk meraih jabatan Menteri Agama menjadi salah satu faktor penyebab keluarnya organisasi sosial keagamaan itu dari Masyumi.

NU juga merasa kurang puas atas perubahan status Majelis Syura Masyumi.¹³ Majelis Syura merupakan tempat berkumpulnya para ulama di internal partai. Para ulama ini berasal dari berbagai organisasi sosial keagamaan, termasuk di antaranya NU. Keterlibatan ulama NU dalam badan tersebut jelas sekali dengan tercatatnya nama K.H. M. Hasyim Asy'ari,¹⁴ sebagai Ketua Umum Majelis Syura Masyumi. NU merasa peran Majelis Syura dikurangi pasca-pelaksanaan Mukhtamar Masyumi ke-IV di Yogyakarta. NU merasa Majelis Syura yang semula bertindak sebagai badan legislatif partai berubah menjadi badan penasihat partai yang hanya akan memberikan nasihat apabila diminta oleh pimpinan partai.¹⁵

Komitmen persatuan yang telah dinyatakan oleh sejumlah pemuka umat Islam tidak dapat dipertahankan begitu lama. Harapan umat Islam Indonesia untuk menjadikan Masyumi sebagai partai politik Islam tunggal sirna, akibat kepentingan-kepentingan yang tidak mampu diakomodasi oleh para elit partai itu sendiri. Hal tersebut menjadi pertanda penting bahwa sesungguhnya persatuan dalam soal pewadahan aspirasi politik di antara umat Islam Indonesia begitu rapuh. Isu mengenai perbedaan latar belakang di antara elite Masyumi diduga

¹³ Hal tersebut dinyatakan oleh H. Aboebakar Atjeh dan Greg Fealy. Selengkapnya mengenai kekecewaan NU itu dapat dilihat dalam Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H. Wahid Hasjim*. Bandung: Mizan Pustaka, 2011, hlm 545; Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. LKis: Yogyakarta, 2003, hlm. 97.

¹⁴ Pada bagian selanjutnya K.H. M. Hasyim Asy'ari akan disebut, K.H. Hasyim Asy'ari.

¹⁵ Aboebakar, *loc cit*, hlm 545.

menjadi hal memengaruhi dinamika internal partai, terutama setelah Mukhtamar Masyumi ke-IV pada 1949.

Keluarnya NU dari Masyumi mengantarkan dua partai politik Islam ini bersaing menghadapi Pemilihan Umum 1955. NU yang pada awalnya cemas menghadapi Pemilu mendapatkan kejutan di luar dugaan setelah berhasil meraih urutan ketiga dalam total perolehan suara nasional. NU meraih total suara 6.955.141 untuk pemilihan anggota DPR,¹⁶ sedangkan, total perolehan suara yang diraih NU untuk Konstituante sebesar 6.989.333.¹⁷ Masyumi sebagai partai besar berhasil meraih urutan kedua dalam total perolehan suara nasional, satu tingkat di atas NU. Masyumi mampu meraih total suara sebesar 7.903.886 untuk anggota DPR,¹⁸ sedangkan total suara yang diperoleh Masyumi untuk Konstituante sebesar 7.789.619.¹⁹

Hubungan Masyumi dengan NU terlihat cukup dinamis. Masyumi sekali pun bukan lagi menjadi partai Islam tunggal setelah PSII berdiri dan NU keluar, tetap bersedia membina kerjasama dengan partai-partai Islam lain di Majelis Konstituante untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.²⁰ Koalisi Masyumi-NU dalam kabinet yang dipimpin Burhanuddin Harahap menunjukkan keharmonisan hubungan antara kedua partai Islam tersebut. Masyumi dan NU memiliki kesamaan sikap dalam menghadapi PKI. Masyumi dan NU melihat PKI

¹⁶ Mudanto Pamungkas, Abdul Cholik, Dewi Mayangsari, dkk, *Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955*. Jakarta Selatan: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019, hlm. 142.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 145

¹⁸ *Ibid*, hlm. 142

¹⁹ *Ibid*, hlm. 145

²⁰ Simak ceramah Mohammad Natsir dalam video dokumenter berjudul “Tasyakur 79 Tahun M. Natsir Pidato Yunan Nasution, Anwar Haryono, dan M. Natsir” dari tautan <https://youtu.be/kANNXw6FUzw><https://youtu.be/kANNXw6FUzw>.

sebagai musuh bersama, walaupun dalam praktiknya dua partai ini memiliki cara tersendiri untuk menghadapinya. NU juga cukup menyesali keterlibatan elite Masyumi dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), oleh karena itu penulis cukup tertarik untuk meneliti hubungan dua partai Islam tersebut dalam skripsi yang berjudul *Dinamika Hubungan Partai Masyumi dengan Partai Nahdlatul Ulama (NU) 1952-1960* ini. Fokus kajian skripsi ini terletak pada hubungan yang terjadi di kalangan elite dua partai tersebut, berhubung ketersediaan sumber primer dan sekunder mengenai kiprah elite Masyumi dan NU cukup melimpah, ada pun, periode yang dipilih yaitu sejak 1952 sampai 1960, periode itu dipilih karena NU menjadi partai politik sendiri pada 1952, sementara Masyumi bubar pada 1960.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, sedangkan rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui proses pengumpulan data.²¹ Rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah “Bagaimana dinamika hubungan Partai Masyumi dengan Partai Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1952–1960?”. Rumusan masalah tersebut dijabarkan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 1.2.1. Bagaimana profil Partai Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU)?
- 1.2.2. Bagaimana hubungan Partai Masyumi dengan NU pada tahun 1945-1952?
- 1.2.3. Bagaimana dinamika hubungan Partai Masyumi dengan Partai NU pada tahun 1952-1960?

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016, hlm. 35.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Tujuan penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut.

- 1.3.1. Menggambarkan profil Partai Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU).
- 1.3.2. Mengungkap hubungan Partai Masyumi dengan NU pada tahun 1945-1952.
- 1.3.3. Mendeskripsikan dinamika hubungan Partai Masyumi dengan Partai NU pada tahun 1952-1960.

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1.4.1. Memberikan gambaran dan pemahaman kepada publik mengenai hubungan yang terjadi antara dua partai Islam di Indonesia terbesar berdasarkan fakta-fakta sejarah.
- 1.4.2. Menjadi salah satu karya ilmiah yang membahas hubungan antara Masyumi dengan NU pada kurun waktu 1952-1960 dan berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
- 1.4.3. Memberikan wawasan empiris kepada publik dalam menilai perbedaan pemikiran politik yang telah mengakar di antara umat Islam Indonesia.

1.5. Landasan Teoritis

1.5.1. Kajian Teori

1.5.1.1. Teori Perubahan Organisasi

Skripsi ini menggunakan teori perubahan organisasi untuk menganalisis hubungan Masyumi dengan NU. Winardi menyatakan bahwa perubahan organisasi merupakan tindakan berubahnya sebuah organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju kondisi di masa mendatang sesuai dengan yang dihendaki untuk meningkatkan efektivitasnya.²² Cummings dan Worley menerangkan bahwa perubahan organisasi disebabkan berbagai permasalahan yang mendorong organisasi tersebut untuk berubah.²³ Akin dan Palmer mengemukakan sejumlah hal yang berpotensi menyebabkan perubahan dalam sebuah organisasi. Mereka berpendapat, kemajuan teknologi, tekanan sosial dan politik, perubahan segmen, kekuatan internal yang meliputi persoalan sumber daya manusia, serta perilaku pengelola adalah hal-hal yang menyebabkan perubahan dalam suatu organisasi.²⁴ Lewin menyatakan bahwa perubahan dalam sebuah organisasi muncul karena adanya dorongan untuk mengurangi atau mempertahankan perilaku organisasi dengan diiringi dialektika mengenai perlu atau tidaknya perubahan.²⁵

Perubahan tidak selamanya berjalan mulus. Penolakan dan dukungan menjadi konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari perubahan itu.²⁶ Konsekuensi

²² Irawaty A. Kahar, "Konsep Kepemimpinan dalam Perubahan Organisasi (Organizational Change pada Perpustakaan Perguruan Tinggi)", *Pustaka: Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi* Vol. 4, No. 1, 2008, hlm. 22.

²³ Erika Setyanti Kusumaputri, *Komitmen pada Perubahan Organisasi (Perubahan Organisasi dalam Perspektif Islam dan Psikologi)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 1.

²⁴ *Ibid.* hlm 1-2.

²⁵ *Ibid.* hlm 2.

²⁶ *Ibid.* hlm 124.

dukungan akan melahirkan komitmen yang kuat terhadap perubahan, sementara, konsekuensi penolakan dapat melahirkan disfungsi sikap seperti enggan terlibat atau bersikap sinis terhadap perubahan. Skripsi ini akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Akin dan Palmer untuk menganalisis dinamika hubungan Masyumi dan NU.

1.5.1.2. Teori Konflik

Sejumlah ilmuwan berpendapat bahwa konflik disebabkan oleh pergeseran-pergeseran nilai dan struktural serta dinamika kekuasaan.²⁷ Konflik sesungguhnya merupakan hal yang mustahil untuk dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai individu yang secara naluriah dituntut untuk hidup bersama dengan individu yang lain, konflik akan sukar untuk dihentikan selama manusia tetap eksis. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat selalu diakibatkan oleh gerakan sosial yang bermacam-macam motifnya dan nyaris seluruhnya menimbulkan gesekan atau konflik. Konflik yang seringkali muncul di tengah masyarakat ini dinilai oleh Ibnu Khaldun berdasarkan hakikat sifat dari manusia itu sendiri yang tidak dapat menghindari pengaruh hawa nafsu. Ibnu Khaldun menerangkan, nafsu dapat memunculkan sifat hewani dalam jiwa manusia sehingga ia berkeinginan untuk mengalahkan dan menguasai pihak-pihak yang sedang menjadi lawannya.²⁸

Ibnu Khaldun menerangkan faktor utama pemicu konflik. Ia menyatakan bahwa konflik dalam lintasan sejarah manusia seringkali disebabkan karena

²⁷ Novri Susan, *Sosiologi Konflik*. Jakarta Timur: Kencana, 2019, hlm 20.

²⁸ *Ibid.*

perasaan fanatisme kelompok yang tinggi (*ashabiyah*).²⁹ Muara dari fanatisme tersebut boleh jadi bertumpu pada identitas, keyakinan, dan golongan masing-masing. Kelompok sosial dari struktur mana pun di dunia ini berpotensi untuk memicu pertikaian. Skripsi ini menggunakan teori konflik dari Ibnu Khaldun sebagai alat bantu untuk menganalisis ketegangan yang mewarnai hubungan Masyumi dengan NU selama kurun penelitian yang telah ditetapkan.

1.5.1.3. Teori Tindakan Kolektif

Skripsi ini menggunakan teori tindakan kolektif atau *collective action*. Beberapa ilmuwan menerangkan, tindakan kolektif merupakan manifestasi yang paling relevan dari gerakan sosial. Zomeren menyatakan bahwa tindakan kolektif adalah pelbagai tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau hegemoni dari setiap kelompok sedangkan, Olyver dengan menggunakan konsep Olson mengemukakan bahwa pada hakikatnya tindakan kolektif muncul karena adanya kepentingan bersama yang diusung oleh kelompok-kelompok tertentu.³⁰ Wahyudi menjabarkan cukup ringkas mengenai definisi tindakan kolektif. Ia menerangkan bahwa kegiatan ini diawali dari sekelompok orang yang berhimpun, lalu melakukan tindakan secara bersama, sementara, yang dimaksud dengan tempat berhimpun dapat berupa organisasi, federasi, asosiasi, dan sejenisnya.³¹ Skripsi ini akan menggunakan teori tindakan kolektif yang dinyatakan Olyver untuk menganalisis hubungan yang terjadi di antara Masyumi dengan NU selama kurun penelitian yang telah ditetapkan.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2016, hlm 65-66.

³¹ *Ibid*, hlm 66.

1.5.2. Kajian Pustaka

Skripsi ini menggunakan 3 pustaka utama untuk mendeskripsikan dinamika hubungan Masyumi dengan NU, yaitu *Partai Islam di Pentas Nasional* tulisan Deliar Noer, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral* tulisan Remy Madinier, dan *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Politik NU 1952-1967* tulisan Greg Fealy. Sebagian besar data yang terdapat pada pustaka tersebut telah digunakan untuk penelitian skripsi ini. Selengkapnya mengenai pustaka-pustaka tersebut dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

1.5.2.1. Partai Islam di Pentas Nasional

Tulisan Deliar Noer berjudul *Partai Islam di Pentas Nasional* merupakan rujukan penting karena sebagian besar data yang digunakan dalam skripsi ini terdapat dalam tulisannya. Pustaka tersebut diterbitkan oleh Pustaka Utama Graffiti pada 1987. Tulisan Deliar Noer merupakan salah satu karya monumental yang membahas dinamika partai-partai Islam selama kurun 20 tahun pasca kemerdekaan Indonesia. Deliar Noer membahas perkembangan empat partai politik Islam di Indonesia yaitu Masyumi, NU, PSII, dan Perti dengan menggunakan pisau analisis yang tajam serta penggunaan bahasa yang tidak begitu kompleks.

Tulisan Deliar Noer membahas sejarah keempat partai politik Islam di Indonesia dengan cukup komprehensif. Akar historis pembentukan empat partai politik Islam yang pernah eksis di percaturan politik Indonesia diterangkan dengan analisis yang mendalam. Tulisan ini juga memuat sejumlah data mengenai peristiwa yang mendorong partai-partai Islam di Indonesia dengan secara terpaksa

menyesuaikan dirinya masing-masing dalam menghadapi era Demokrasi Terpimpin. Tulisan Deliar Noer tersebut didominasi oleh sudut pandang modern, sehingga, kurang mampu menguak pemikiran politik partai-partai Islam tradisional seperti NU dan Perti.

1.5.2.2. Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral

Tulisan Remy Madinier berjudul *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral* memuat sebagian besar data yang dibutuhkan untuk skripsi ini. Pustaka tersebut diterbitkan oleh Mizan pada 2013 silam. Tulisan Remy Madinier termasuk ke dalam pustaka utama yang membahas perkembangan Masyumi sebagai partai politik Islam terbesar di Indonesia. Remy Madinier menerangkan analisisnya secara komprehensif mengenai kiprah Partai Masyumi di panggung sejarah politik Indonesia. Tulisan Remy Madinier membahas secara utuh dinamika juga kontradiksi-kontradiksi yang pernah dibuat oleh Masyumi selama era Demokrasi Parlementer. Pembahasan mengenai hubungan badan khusus Masyumi dengan Masyumi merupakan hal yang tidak akan dijumpai dalam pustaka yang telah diterangkan sebelumnya.

1.5.2.3. Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952 - 1967

Tulisan Greg Fealy berjudul *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* adalah pustaka yang memuat sebagian besar data mengenai NU dalam skripsi ini. Tulisan tersebut diterbitkan oleh LKIS pada 2003 yang lalu. Greg Fealy dalam tulisannya menguraikan perkembangan Partai NU dan analisisnya mengenai sikap politik NU secara komprehensif. Greg Fealy menguraikan secara alasan NU keluar sebagai anggota istimewa Masyumi. Tulisan Greg Fealy tersebut

dilengkapi rujukan-rujukan penting yang terdiri atas arsip-arsip resmi PBNU, dokumen-dokumen, dan wawancara eksklusif dengan elite PBNU. Greg Fealy telah berjasa dalam menyajikan sebuah karya penting yang boleh dikatakan bantahan atas tuduhan-tuduhan tak berdasar para peneliti yang acapkali keliru menilai sikap politik NU.

1.5.3. Hasil Penelitian yang Relevan

Pertama, artikel ilmiah berjudul *Hubungan NU dan Masyumi (1945-1960) Konflik dan Keluarnya NU Dari Masyumi* tulisan Moh. Amirul Mukminin adalah salah satu historiografi yang memiliki relevansi dengan skripsi ini. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal *Avatara* volume 3 nomor 2, pada Oktober 2015 silam. Artikel ini memiliki objek penelitian yang sama dengan skripsi ini. Artikel yang dimaksud maupun skripsi ini membahas mengenai hubungan Masyumi dan NU, hanya saja batasan temporal tersebut lebih panjang dibandingkan dengan skripsi ini, yaitu selama 15 tahun, terhitung dari 1945 sampai dengan 1960.³² Hasil penelitian artikel ini hanya menekankan pada konflik yang menyebabkan keluarnya NU dari Masyumi serta perbedaan sikap yang mencolok antara NU dengan Masyumi selama masa Demokrasi Parlementer.³³ Artikel ini tidak membahas dinamika hubungan Masyumi dan NU secara komprehensif.

Skripsi ini melengkapi historiografi karya Moh. Amirul Mukminin. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pembahasan mengenai konflik yang terjadi di antara Masyumi dan NU selama kurun waktu 1952. Skripsi ini juga mengungkap realitas hubungan Masyumi dengan NU pada 1952 hingga 1960.

³² Moh. Amirul Mukminin, "Hubungan NU dan Masyumi (1945-1960) Konflik dan Keluarnya NU Dari Masyumi", *Avatara*, Vol. 3, No.2, 2015.

³³ *Ibid.*

Penelitian ini menggunakan sumber primer yang terdiri atas arsip-arsip resmi dari PBNU maupun Masyumi serta beberapa surat kabar sezaman yang memuat data mengenai hubungan Masyumi dan NU.

Kedua, artikel ilmiah berjudul *Tulang Punggung Dipunggungi: Pecah Kongsi NU-Masyumi Jelang Pemilu 1955* tulisan Idhar Anwar merupakan historiografi yang memiliki relevansi dengan skripsi ini. Artikel ini diterbitkan jurnal *Al-Qalam* volume 26 nomor 2, November 2020 yang lalu. Artikel yang dimaksud memiliki kesamaan objek penelitian dengan skripsi ini. Artikel tersebut memuat alasan mengenai keluarnya NU dari Masyumi serta pencapaian yang diraih oleh kedua partai Islam tersebut dalam ajang Pemilihan Umum 1955.³⁴ Artikel tulisan Idhar Anwar nampaknya terlalu mengandalkan literatur serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh NU.

Penelitian ini melengkapi historiografi karya Idhar Anwar. Skripsi ini tidak hanya mengungkap hubungan Masyumi dan NU selama menjelang Pemilu 1955. Penelitian ini mendeskripsikan realitas hubungan Masyumi dengan NU selama kurun waktu 1952 sampai dengan 1960. Skripsi ini juga menggunakan sumber primer yang terdiri atas arsip-arsip resmi dari PBNU maupun Masyumi serta sejumlah surat kabar sezaman yang mengabarkan hubungan kedua partai tersebut.

Ketiga, artikel ilmiah berjudul *Pergumulan Partai Politik Islam pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang* yang ditulis oleh Muhammad Rijal Fadli merupakan historiografi yang memiliki

³⁴ Idham Anwar, "Tulang Punggung Dipunggungi: Pecah Kongsi NU-Masyumi Jelang Pemilu 1955", *Al-Qalam*, Vol. 26, No.2, 2020.

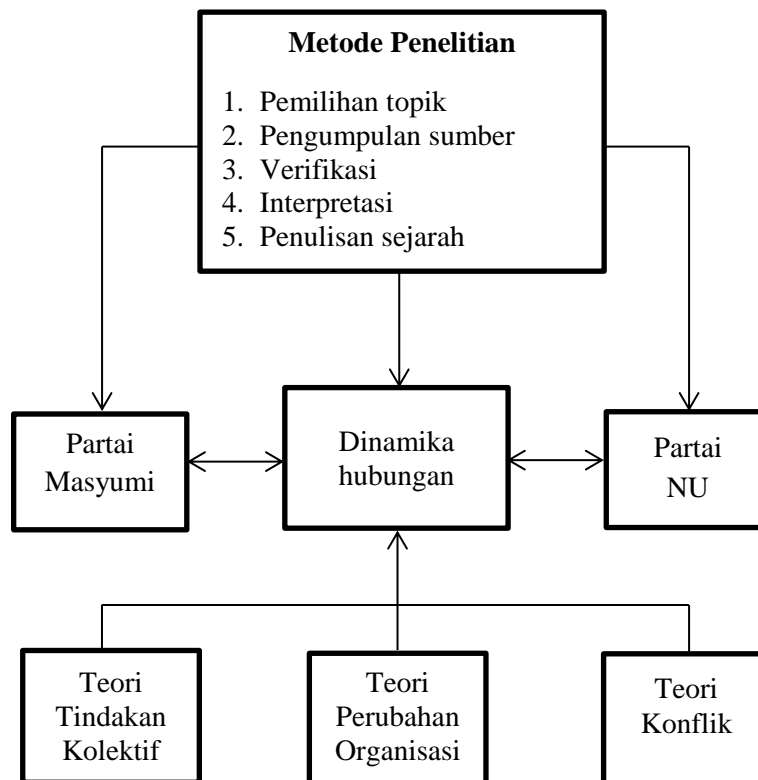
sejumlah relevansi dengan skripsi ini. Artikel tersebut diterbitkan dalam jurnal *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* volume 4 nomor 1, Agustus 2020. Artikel yang dimaksud memiliki objek penelitian yang hampir sama dengan skripsi ini. Artikel ini membahas mengenai dinamika yang dialami oleh tiga partai politik Islam Indonesia; Masyumi, NU, dan PSII dalam menghadapi masa Demokrasi Terpimpin.³⁵

Penelitian ini menyempurnakan historiografi karya Muhammad Rijal Fadli. Fokus skripsi ini terletak pada hubungan yang terjadi antara Masyumi dengan NU selama 1952 sampai dengan 1960. Skripsi ini tidak didominasi oleh penggunaan sumber sekunder. Skripsi ini, di samping menggunakan sumber sekunder, akan menggunakan khazanah sumber primer yang terdiri atas arsip-arsip resmi dari PBNU maupun Masyumi serta beberapa surat kabar sezaman.

1.5.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Skripsi ini mendeskripsikan dinamika hubungan yang terjadi antara Masyumi dengan NU pada tahun 1952-1960 melalui pendekatan teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Hubungan kedua partai tersebut difokuskan pada tataran elitnya, sedangkan, teori yang digunakan dalam uraian skripsi ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan hubungan Masyumi dan NU selama batasan temporal yang telah ditetapkan.

³⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Pergumulan Partai Politik Islam pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang", *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, Vol. 4, No.1, 2020.



Gambar 1.1. Kerangka Konseptual

1.6. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah.³⁶ Metode ini merujuk pada syarat metode penelitian sejarah yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo.

1.6.1. Pemilihan Topik

Kuntowijoyo menerangkan bahwa pemilihan topik penelitian sejarah perlu didasarkan atas kedekatan peneliti dengan objek penelitiannya. Kedekatan tersebut terdiri atas dua aspek yaitu kedekatan emosional dan intelektual.³⁷ Aspek kedekatan emosional dengan objek skripsi ini terletak pada latar belakang penulis

³⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013, hlm. 69.

³⁷ *Ibid*, hlm 70.

sebagai aktivis pergerakan Islam yang memiliki minat dalam memahami perkembangan politik di Indonesia. Aspek kedekatan intelektual dengan objek skripsi ini terbangun setelah penulis menelaah pelbagai literatur mengenai sejarah dan tokoh-tokoh politik Islam di Indonesia.

1.6.2. Pengumpulan Sumber

Pengumpulan sumber merupakan kegiatan mengumpulkan sumber-sumber yang hendak digunakan sebagai bahan untuk penelitian sejarah. Skripsi ini menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan topik penelitian yang telah dipilih.³⁸ Skripsi ini menggunakan *system cards* sebagai teknik untuk mengumpulkan data-data yang dianggap relevan dengan topik penelitian. *System cards* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan berbagai hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik yang dipilih selama penelitian sedang berlangsung,³⁹ misalnya dengan cara sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan judul arsip, dokumen, atau buku.
2. Mendokumentasikan bagian-bagian penting dari isi arsip, dokumen, atau buku yang diperlukan untuk penelitian.
3. Mendokumentasikan periode diterbitkannya suatu arsip, dokumen atau buku.

Sumber yang biasa digunakan dalam penelitian sejarah terdiri atas sumber primer dan sekunder.⁴⁰ Sumber primer secara sederhana dapat dimaknai adalah sumber utama yang digunakan oleh seorang peneliti sejarah. Taraf kesahihan sumber primer lebih tinggi jika dibandingkan dengan sumber sekunder. Sumber primer pada umumnya berasal dari keterangan pihak pertama, maksudnya adalah

³⁸ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2020, hlm. 57

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Nina H. Lubis, *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika, 2020, hlm. 20.

pihak-pihak yang menjadi pelaku sejarah atau para saksi dari suatu peristiwa sejarah, baik dalam bentuk catatan-catatan pribadi atau penuturan secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁴¹ Skripsi ini menggunakan sumber primer yaitu arsip-arsip resmi Masyumi dan PBNU, berbagai artikel dari surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, *Berita Indonesia*, *Haluan*, *Duta Masyarakat*, *Abadi*, majalah *Aliran Islam*, *Gema Muslimin* dan *Hikmah*. Sumber-sumber primer dalam skripsi ini diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional RI, *online* berbayar dari akun Instagram @buku_demit dan meminjam koleksi dari tokoh tertentu.

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang keterangannya diperoleh bukan dari pihak pertama.⁴² Sumber sekunder dapat didefinisikan sebagai sumber hasil interpretasi peneliti-peneliti sejarah yang lain dan telah berubah bentuknya ke dalam buku, artikel, atau hasil kajian tentang sebuah peristiwa sejarah.⁴³ Skripsi ini menggunakan sejumlah sumber sekunder sebagai alat penunjang untuk memahami sumber primer. Sumber sekunder yang digunakan dalam skripsi ini di antaranya adalah pustaka-pustaka yang membahas sejarah Partai Masyumi maupun NU.

1.6.3. Verifikasi

Verifikasi atau kritik sumber merupakan tahapan proses memilih dan memilah serta mempertimbangkan sumber ditinjau baik dari fisik maupun isinya. Verifikasi atau kritik sumber ini terbagi menjadi dua macam yaitu kritik ekstern

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid*, hlm 26.

⁴³ *Ibid*, hlm 27.

dan intern.⁴⁴ Kritik ekstern merupakan tahap verifikasi yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap keaslian sumber. Kritik intern merupakan tahap verifikasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap kredibilitas dan reliabilitas isi sumber-sumber yang telah dihimpun.

Kritik ekstern ditujukan untuk memastikan keabsahan sumber secara fisik seperti dengan menganalisis tahun dikeluarkannya sumber dan bahan yang digunakan untuk penulisan sumber, sedangkan kritik intern ditujukan untuk memastikan isi sumber serta membandingkannya dengan sumber-sumber yang lainnya. Kritik ekstern untuk sumber-sumber skripsi ini telah dilakukan dengan cara mengidentifikasi identitas sumber seperti penulis, penerbit, tahun terbit, dan keaslian bahannya. Kritik intern untuk sumber-sumber skripsi ini juga telah dilakukan dengan cara menelaah isi berbagai sumber, membandingkan, dan mengonfrontasikan data satu sumber dengan data yang diperoleh dari sumber lainnya.

Penerapan kritik ekstern dan intern dalam penelitian ini contohnya dilakukan ketika menelaah majalah *Aliran Islam*. Kritik ekstern dilakukan dengan mengidentifikasi tahun terbit, tempat terbit, nomor seri, dan keaslian bahan cetaknya. Majalah tersebut diterbitkan di Jalan Kopo, Bandung pada 1949, dengan nomor seri No.14, Thn. III. Bahan cetak majalah tersebut orisinil, sementara pemimpin umum majalah ini adalah K.H. Isa Anshary. Kritik intern untuk majalah ini dilakukan ketika menelaah salah satu artikel berjudul “Natsir Pegang Pimpinan”. Artikel ini ditulis oleh K.H. Isa Anshary. Isi artikel ini adalah

⁴⁴ Kuntowijoyo, *op cit*, hlm 77.

sambutan atas terpilihnya Mohammad Natsir sebagai Ketua Umum Masyumi dalam Mukhtamar Masyumi di Yogyakarta pada 15-19 Desember 1949.

1.6.4. Interpretasi

Interpretasi merupakan proses menafsirkan fakta-fakta untuk menetapkan makna dari isi sumber-sumber yang saling berhubungan.⁴⁵ Tahapan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu analisis untuk mengkaji dan menguraikan isi sumber-sumber serta sintesis untuk mengintegrasikan hasil dari berbagai penafsirannya. Tahap interpretasi dalam skripsi ini dilakukan dengan cara menelaah dan menguraikan isi sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Tahap interpretasi dilanjutkan dengan melakukan sintesis dari berbagai hasil penafsiran isi sumber untuk merekonstruksi fakta sejarah mengenai dinamika hubungan Masyumi dengan NU.

1.6.5. Penulisan Sejarah

Penulisan sejarah atau historiografi merupakan kegiatan menyajikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif masa lalu sesuai dengan jejak-jejaknya dalam bentuk tulisan setelah melewati tahapan penafsiran terhadap fakta sejarah yang telah ditemukan.⁴⁶ Kuntowijoyo menyatakan bahwa aspek kronologis menjadi hal yang sangat penting dalam penyajian tulisan sejarah. Ia menyatakan bahwa terdapat tiga bagian penting yang harus terdapat dalam tulisan sejarah yaitu pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan.⁴⁷ Penulisan sejarah dalam skripsi ini secara garis besar telah diuraikan pada tiga bagian penting tersebut. Skripsi ini memuat bagian

⁴⁵ Nina H. Lubis, *op cit*, hlm 30.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Kuntowijoyo, *op cit*, hlm 81.

pengantar pada BAB I, hasil penelitian pada BAB II,III, dan IV, serta kesimpulan pada BAB V.

1.7. Sistematika Bab

Skripsi berjudul “Dinamika Hubungan Partai Masyumi dengan Partai Nahdlatul Ulama (NU) 1952 – 1960” diuraikan ke dalam 5 bab.

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dari skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan dari penelitian, tinjauan teoritis, kajian pustaka, historiografi yang relevan, kerangka konseptual penelitian, dan metode penelitian.

BAB II merupakan pembahasan mengenai profil Masyumi dengan NU. BAB II ditujukan agar para pembaca dapat memahami objek penelitian secara lebih utuh. Pembahasan BAB II terdiri atas tiga sub-bab yaitu mengenai pembentukan Masyumi dan NU, susunan awal Pengurus Besar Masyumi dan NU, serta kiprah dari Masyumi maupun NU dalam sejarah Indonesia.

BAB III merupakan pembahasan mengenai hubungan Masyumi dengan NU pada tahun 1945-1952. BAB III ditujukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika hubungan antara Masyumi dengan NU, sebelum nantinya NU resmi keluar dari Masyumi. Pembahasan BAB III terdiri atas dua sub-bab yaitu pembahasan mengenai kondisi hubungan Masyumi dengan NU selama kurun waktu 1945-1949 dan kondisi hubungan Masyumi dengan NU selama kurun waktu 1949-1952. Sub-bab terakhir ini terbagi ke dalam dua pembahasan yaitu mengenai dominasi elite muda Masyumi, status Majelis Syura Masyumi, dan status keanggotaan istimewa.

BAB IV merupakan bab yang berisi mengenai dinamika hubungan Masyumi dengan NU pada tahun 1952-1960. BAB IV terdiri atas tujuh pembahasan yaitu tentang keluarnya NU dari Masyumi, sikap oposisi Masyumi terhadap NU, kerjasama kedua partai tersebut dalam Kabinet Burhanuddin Harahap, hubungan Masyumi dengan NU menjelang Pemilu 1955, hubungan kedua partai tersebut pasca-Pemilu 1955, dukungan NU terhadap Masyumi, dan sikap NU atas keterlibatan sebagian kecil elite Masyumi dalam PRRI

BAB V merupakan simpulan dan saran dari skripsi ini. Isinya terdiri atas simpulan dan saran kepada para pemuka umat Islam, umat Islam, para guru sejarah dan para peneliti sejarah Masyumi maupun NU agar dapat mengambil pelajaran serta mengembangkan penelitian tentang Masyumi dan NU pada masa mendatang.